



---

**KAJIAN KARAKTERISTIK DAN METODE PENANGANAN KAWASAN KUMUH  
(STUDI KASUS: KECAMATAN SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG)**

**Sri Kumala<sup>1</sup> dan Fitri Yusman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

email: [malamoo21@gmail.com](mailto:malamoo21@gmail.com)

**Abstrak:** Perkembangan lingkungan permukiman di Kota Semarang tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduknya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan Semarang, kebutuhan akan penyediaan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat. Namun pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman kurang terpenuhi, sehingga menimbulkan kawasan kumuh. Kecamatan Semarang Timur merupakan salah satu kecamatan di Semarang yang memiliki kawasan kumuh. Permasalahan yang terdapat di Kecamatan Semarang Timur berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan yang memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat. Konflik muncul karena belum diketahuinya karakteristik kawasan kumuh serta metode penanganan yang kurang tepat. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, muncul sebuah pertanyaan penelitian yaitu "Bagaimana karakteristik kawasan kumuh? Bentuk penanganan yang seperti apakah yang sesuai dengan karakteristik kawasan kumuh tersebut?". Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data lokasi kawasan kumuh berikut karakteristik dari masing-masing lokasi kawasan kumuh di Kecamatan Semarang Timur serta mendapatkan metode penanganan kawasan kumuh yang sesuai. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis normatif. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan random sampling dengan cara observasi, wawancara, dan menyebarkan kuisioner kepada responden. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebaran kawasan kumuh berikut karakteristiknya di Kecamatan Semarang Timur meliputi komponen fisik yaitu jaringan jalan, persampahan, air bersih, sanitasi, dan drainase serta komponen non-fisik meliputi partisipasi masyarakat, pendidikan, pendapatan dengan metode penanganan perbaikan kampung yaitu penyempurnaan program Gerdu Kempling menggunakan konsep TRIBINA.

**Kata Kunci:** Karakteristik Kawasan Kumuh, Metode Penanganan, Kawasan Kumuh

**Abstract:** The development of neighbourhoods in Semarang is inseparable from the rapid rate of population growth in it. Along with the growth of population in urban areas of Semarang, the need for the provision of infrastructure and housing will increase. However, the needs of residential infrastructure are less fulfilled, so the slums raised. East Semarang Subdistrict is one of the Semarang areas with slums. The issues in East Semarang Subdistrict are associated with poverty and inequality that lead to the conflict between the government and society. Conflict arises because of the characteristics of slums are yet unknown and the improper handling methods of the slums. Based on these problems, the research question occurs is "How is the characteristics of the slums? What forms of handling are appropriate to the characteristics of the slums?" This study aims to obtain location data of the slums with the following characteristics of each slum locations in the East Semarang Subdistrict and get appropriate treatment methods for the slums. The method used in this study is quantitative method. The analysis used are descriptive analysis and normative analysis. Quantitative data collection is using random sampling by doing observations, interviews, and distributing questionnaires to the respondents. The final result of this study is the distribution of slum areas in East Semarang Subdistrict and the following characteristics of each, including the physical components which are the road network, waste, water, sanitation, and drainage, as well as the non-physical components which are community participation,

*education, and community's income, with Kampong improvement handling methods which is Kampong improvement program using the concept of TRIBINA for Gerdu Kempling program.*

**Keywords : Slum Area Characteristics, Treatment Methods, Slum Area**

## PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula. Selanjutnya, pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap terjadinya lingkungan permukiman kumuh.

Secara umum, lingkungan permukiman kumuh di perkotaan di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Semarang, khususnya Kecamatan Semarang Timur merupakan suatu hal yang sangat kompleks yang di dalamnya terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan serta ketidak disiplin sosial maupun yang menyangkut kemampuan lembaga-lembaga pemerintahan kota/kabupaten dalam pengaturan, pengorganisasian spasial maupun sumber daya yang dimiliki oleh kota sesuai dengan hakekat fungsi kota. Hal tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan antara pemerintah dengan masyarakat karena pemerintah belum menguasai karakteristik di kawasan kumuh dengan baik, ditambah kurang tepatnya model penanganan yang selama ini dilakukan.

Menurut Putro (2011) keberadaan lingkungan kawasan permukiman kumuh membawa permasalahan baru, seperti perkembangan fisik kota yang tidak baik, memberikan efek visual yang jelek, tingkat kesehatan masyarakat yang semakin rendah sebagai akibat dari kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan memberikan dampak sosial dan ekonomi

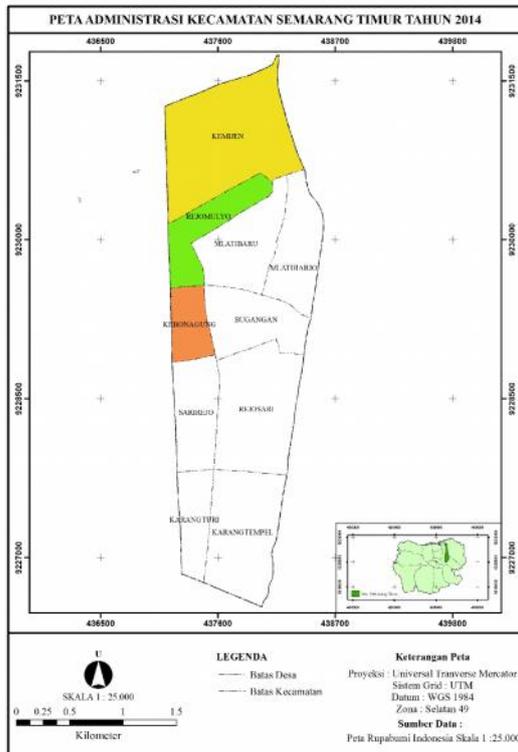
masyarakat yang buruk.

Kehadiran permukiman kumuh cenderung terus berkembang sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, masyarakat berpenghasilan rendah hanya dapat membangun tempat tinggal pada tempat-tempat yang sesuai dengan daya dan kemampuan. Mereka menempati permukiman pada lahan yang bukan dicadangkan untuk kawasan hunian. Mereka tidak mampu membeli lahan atau rumah yang layak huni, sehingga mereka menyerbu lahan-lahan kosong yang memungkinkan mereka untuk mendirikan gubuk-gubuk dengan bahan bangunan murah yang terjangkau dan bahkan dari limbah. Mereka hanya bisa mendirikan gubuk-gubuk yang terbuat dari barang-barang bekas (sisa/buangan) seperti seng bekas, kardus, kayu-kayu potongan, bambu usang dan sebagainya pada lokasi-lokasi yang kosong dan tak bertuan di berbagai pojok kota, tanpa memperhatikan aturan-aturan kota (*master plan*).

Kondisi prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman tentu tidak tersedia pada lokasi tersebut dan apabila tersedia tentu sangat minim dan belum memadai, sehingga tidak jarang kondisi yang demikian turut menciptakan kekumuhan bagi lingkungan yang ditempatinya (*slums area*). Sebagaimana dari mereka ada juga yang mendirikan rumah-rumah liar pada lahan-lahan ilegal dan membentuk lingkungan *squatters*. Hal ini menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan Kajian Karakteristik dan Metode Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Kasus kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang).

Ruang lingkup wilayah yang diamati pada penelitian ini adalah Kawasan Kumuh (Studi Kasus Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang) mencakup 3 kelurahan, yaitu

Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Kemijen, dan Kelurahan Rejomulyo.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2013

**GAMBAR 1**  
**PETA RUANG LINGKUP PENELITIAN**

## KAJIAN LITERATUR

### *Kemiskinan*

Bank Dunia dalam Dissemination Paper-nya (World Bank, 2003) tentang “Kota-Kota dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia” mengemukakan tentang kondisi kemiskinan perkotaan di Indonesia sebagai berikut :

1. Kepemilikan dan akses terhadap tanah yang sulit dan yang sangat terbatas.
2. Rumah berfungsi ganda serta kepemilikannya sangat beresiko dan kebanyakan adalah ilegal.
3. Tingkat pendidikan keluarga sangat rendah dan ketergantungan keluarga yang besar.

4. Kondisi lingkungan buruk yang beresiko pada akses/tingkat kesehatan yang rendah.
5. Status pekerjaan tidak menentu dan bekerja seadanya sebisa mungkin serta tingkat pengangguran yang tinggi.
6. Sangat terbatasnya akses ke fasilitas dasar perkotaan.

Berdasarkan hasil paper Bank Dunia mengenai kondisi kemiskinan perkotaan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan perkotaan tercermin pada kondisi lingkungan perumahan yang buruk dengan akses terhadap fasilitas dasar perkotaan yang sangat terbatas dan kepemilikan tanah yang ilegal, serta dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhan minimumnya.

Emil Salim (1984) dalam Ridlo (2001) mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok. Dalam membahas kemiskinan di Asia Selatan dan Asia Tenggara, Ghose dan Keith Griffin (1980) dalam Ridlo (2001), mengatakan kemiskinan di negara-negara ini berarti kelaparan, kekurangan gizi, ditambah pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, tidak ada atau sedikit sekali kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang elementer, dan lain-lain.

### *Permukiman Kumuh dan Liar*

Turner (1972) dalam Ridlo (2001) menyatakan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman hunian dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali. Dalam terminologi pengertian permukiman kumuh dan liar adalah berbeda. Permukiman kumuh atau yang sering disebut *Slums* merupakan daerah perumahan padat di dalam kota, yang sebagian besar penduduknya dihadapkan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, namun kepemilikan tanahnya semua adalah sah, sedangkan permukiman liar atau yang sering disebut dengan *squatter* merupakan tempat

bermukim, yang dalam segala hal yang sama dengan *slum*, terkecuali dalam hal kepemilikan tanah Drakakis (dalam Ridlo, 2001).

#### *Pemberdayaan Sebagai Proses Pengembangan Partisipasi Masyarakat*

Secara umum partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan, Wolcook dan Narayan (dalam Mardikanto & Soebiato, 2012) menunjukkan bahwa partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat maupun sinergi dala, “jejaringan komunitas” atau *community network*.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pembangunan yang menunjang keberhasilan dari suatu program. Seberapa kerasnya usaha pemerintah membangun, jika tidak melibatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat maka tingkat keberhasilan pembangunan dan keberlanjutan program pembangunan tidak akan maksimal. Kegiatan pembangunan bukan hanya kewajiban pemerintah, namun menuntut keterlibatan masyarakat demi mutu hidup yang lebih baik.

#### *Metode Penangan Kawasan Kumuh*

Menurut Ridlo, 2001, pp. 91–99 terdapat usaha bentuk-bentuk perbaikan lingkungan permukiman kumuh, yaitu sebagai berikut :

- a. Peremajaan Kota (Urban Renewal)
- b. Program Perbaikan Kampung (KIP)
- c. Rumah Susun
- d. Relokasi (Resettlement)
- e. Konsolidasi Lahan
- f. Pembagian Lahan (Land Sharing)
- g. Pengembangan Lahan Terarah (Guide Land Development)

### **METODE PENELITIAN**

#### *Pendekatan Penelitian*

Metode penelitian dalam penelitian ini Penelitian ini dilakukan untuk menentukan metode penanganan yang sesuai dengan karakteristik kawasan kumuh di Kecamatan

Semarang Timur, Kota Semarang. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif menurut Creswell & John W (1994:153) penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif meliputi tahap pengujian suatu teori, pengujian hipotesis atau pertanyaan penelitian yang muncul dari teori, mengoperasionalkan konsep atau variabel, dan menggunakan instrumen untuk mengukur variabel tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran dari penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian dengan positivistik. Pendekatan ini cukup praktis dengan hasil analisisnya yang cukup mudah dipahami.

#### *Analisis Penelitian*

Analisis Penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dan normative kuantitatif; Analisis Aspek Non-fisik Kawasan Kumuh, Analisis Aspek Kondisi Lingkungan, Analisis Aspek Sarana dan Prasarana, Analisis Permasalahan Kawasan Kumuh Kecamatan Semarang Timur, Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Kumuh, Analisis Metode Penanganan Kawasan Kumuh.

#### 1. Karakteristik Kawasan Kumuh Aspek Non Fisik

##### 1.1 Daerah Asal

Sebagian besar penduduk dari 3 kelurahan, yaitu : Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo berasal dari luar Kota Semarang, mereka berasal dari daerah di sekitar kota Semarang seperti Solo, Wonogiri, Demak, Purwodadi, Pati maupun daerah lain di Jawa Tengah atau luar Jawa Tengah.

##### 1.2 Jumlah Keluarga

Jumlah keluarga dalam rumah masing-masing dari 3 kelurahan (Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo) mayoritas berjumlah 4-6 orang dalam satu rumah.

Dari standart minimal dari Dirjen Cipta Karya hal ini dianggap tidak ideal karena dapat diasumsikan bahwa 1 kamar tidur dimanfaatkan oleh 2-3 orang, dengan demikian kebutuhan ruang-ruang tidak

terpenuhi dan tidak dapat diorganisasikan dengan baik karena luasan yang terbatas.

### 1.3 Alasan Bermigrasi

Alasan bermigrasi penduduk di Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo paling banyak adalah untuk mencari pekerjaan. Hanya sebagian kecil masyarakat asli yang bertempat tinggal disini. Hal tersebut membuktikan bahwa kota merupakan alternatif bagi penduduk di desa untuk mencari alternatif pekerjaan meskipun harus berpindah.

### 1.4 Pendidikan Terakhir

Latar belakang pendidikan masyarakat di Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo ini tergolong pendidikan rendah, dimana dengan pendidikan yang dimiliki tersebut masyarakat tidak memiliki pekerjaan di sektor formal. Hal ini karena bekerja di sektor formal membutuhkan latar pendidikan yang tinggi dan keahlian serta ketrampilan khusus atau tinggi. Umumnya masyarakat hanya menerima pendidikan SD, SMP dan Sebagian SMA.

### 1.5 Pekerjaan

Penduduk Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo sebagian besar bekerja sebagai buruh, pemulung, pengangguran, pensiunan. Kondisi ini menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk bekerja pada sektor informal. Secara ekonomis, dikarenakan kondisi perekonomian yang relatif rendah, kemampuan masyarakat penghuni untuk merealisasikan perbaikan lingkungan huniannya sangatlah terbatas bahkan tidak mungkin. Sandang dan pangan merupakan prioritas utama penghuni untuk mengalokasikan dana yang mereka peroleh sebagai pemenuhan kelangsungan hidup.

### 1.6 Penghasilan

Penduduk Kelurahan Kebonagung, Kemijen dan Rejomulyo memiliki Kondisi perekonomian yang relatif rendah, kemampuan masyarakat penghuni untuk merealisasikan perbaikan lingkungan

huniannya sangatlah terbatas bahkan tidak mungkin. Sandang dan pangan merupakan prioritas utama penghuni untuk mengalokasikan dana yang mereka peroleh sebagai pemenuhan kelangsungan hidup. sebagian besar di bawah Rp. 500.000,- (78%).

## 2. Karakteristik Kawasan Kumuh Aspek Kondisi Lingkungan

### 2.1 Lokasi Rumah dan Luas Rumah

Pemilihan lokasi rumah Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo umumnya karena berdekatan dengan tempat bekerja ataupun berdekatan dengan fasilitas umum yang biasa digunakan, seperti pasar (78%). Luas lantai bangunan rumah di pemukiman kumuh pun bervariasi antara 4-60 m<sup>2</sup>. Demikian pula dengan luas tanahnya, yaitu antara 4-75 m<sup>2</sup>. Dilihat dari besaran persentase menunjukkan sebagian besar luas rumah penduduk di Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo kurang dari 26m<sup>2</sup>, adapula yang memiliki luas antara 26-52m<sup>2</sup> bahkan lebih dari 52m<sup>2</sup>.

### 2.2 Lingkungan Organisasi

Penduduk Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo dalam kegiatan kampung diketahui bahwa masyarakat enggan untuk mengikuti kegiatan kampung. Sebagian besar masyarakat tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di perkampungan.

### 2.3 Kualitas Rumah dan Lantai Rumah

Kondisi sosial ekonomi yang masih rendah akan berpengaruh pada konstruksi bangunan yang dihuni, kualitas rumah yang terdapat di Kelurahan Kebonagung, Kemijen dan Rejomulyo dimana sebagian besar penduduk memiliki bangunan rumah semi permanen atau rumah setengah tembok. Lantai Rumah yang berkeramik pada rumah penduduk Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo hanya sebagian kecil (7%). Itu artinya sebagian besar lantai rumah yang ada masih berupa lantai tanah, sehingga jika pada musim hujan kondisinya akan kotor sekali sehingga memberikan kesan kumuh.

#### 2.4 Jarak Antar Rumah

Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo memiliki jarak antar bangunan rumah di pemukiman kumuh Kelurahan Kebonagung nampak berhimpitan atau hanya kurang dari 1 meter atau 2 meter. Kondisi ini sangat berbahaya jika terjadi kebakaran.

#### 2.5 Sirkulasi Udara Rumah dan Ketercukupan Sinar Matahari

Sirkulasi udara yang tidak lancar akan menyebabkan kondisi ruangan rumah akan terasa pengap dan tidak sehat. Namun kondisi rumah di Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo sebagian sudah memiliki saluran atau ventilasi udara di jendela depan, samping dan belakang. Banyaknya jendela yang dimiliki rumah maka sirkulasi udara akan lancar dan menyebabkan kondisi ruangan rumah akan terasa segar karena banyak udara yang masuk namun untuk ketercukupan sinar matahari kurang sehingga kondisi rumah lembab dan pengap. Hal ini karena seluruh rumah di Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo hanya mendapat sinar matahari dari jendela.

#### 2.6 Taman Kampung

Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo masih kekurangan public space seperti taman kampung. Hal ini menggambarkan kurangnya penghijauan di wilayah tersebut dan akan menambah tingkat polusi.

#### 2.7 Polusi Udara, Pencemaran dan Kebisingan

Polusi udara di wilayah Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo tierbilang cukup tinggi dan mayoritas dihasilkan dari jalan raya yang ramai. Pencemaran dan kebisingan di 3 Kelurahan ini diketahui sebagian besar dari jalan raya, kemudian juga dihasilkan dari industri.

### 3. Karakteristik Kawasan Kumuh aspek komponen Fisik Prasarana Lingkungan

#### 3.1 Sarana MCK

Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo sebagian besar sudah memiliki fasilitas MCK serta ketersediaan MCK di

rumah-rumah penduduk walau dengan kondisi seadanya (kurang baik).

#### 3.2 Sarana Tempat Sampah

Pada Kelurahan Kebonagung 74% menyatakan membuang sampah di tempat sampah, sedangkan pada Kelurahan Kemijen dan Rejomulyo sebagian besar membuang sampah di sungai, hal ini menyebabkan kesan kumuh dan tersumbatnya aliran sungai sehingga rawan terjadi banjir saat hujan.

#### 3.3 Saluran Limbah

Sebagian besar di Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo tidak terdapat saluran limbah, walaupun ada penduduk menyatakan terdapat saluran limbah dengan kondisinya tidak lancar dan menggenang. Kondisi seperti ini sangat tidak baik untuk kesehatan, rawan banjir, dan memiliki kesan kumuh.

#### 3.4 Akses Jalan Kampung

Dari besaran persentase diketahui sebanyak 89% jalan kampung di Kelurahan Kebonagung memiliki lebar 1-2 meter. Namun di Kelurahan Kemijen dan Rejomulyo sebagian besar sudah memiliki lebar 2-3 meter, bahkan di Kelurahan Rejomulyo sudah menggunakan paving. Secara keseluruhan kondisi akses jalan kampung sudah baik walau masih ada yang belum memenuhi standar.

#### 3.5 Jaringan Air Bersih

Penduduk Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo sebagian besar sudah menggunakan PDAM, hanya saja mendistribusikannya kurang menyeluruh sehingga masih ada yang menggunakan sumur artesis atau yang membeli air bersih yang dijual keliling.

#### 3.6 Sarana Ibadah

Sarana Ibadah tersedia dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan adanya sarana ibadah berupa masjid. Sarana ibadah yang paling banyak tersedia adalah mushola, dengan demikian warga Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo dapat menjalankan ibadah dengan baik.

### 3.7 Sarana Tempat Cuci Pakaian

Penduduk Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo mayoritas telah memiliki tempat cuci pakaian masing-masing di rumah mereka.

### 3.8 Sarana Tempat Jemur Pakaian

Tempat khusus untuk menjemur pakaian belum dimiliki oleh warga Kelurahan Kebonagung, Kemijen dan Rejomulyo. Mereka masih ada yang menjemur pakaian di jalan, dan di depan rumah mereka. Pemandangan ini tentu tidak sedap dipandang mata karena terlihat tidak rapi dan tertata.

### 3.9 Sarana Mandi

Sarana mandi sebagian besar sudah dipenuhi oleh warga Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo ini, walaupun dengan keadaan yang sederhana tapi paling tidak mereka mandi tidak di sungai.

### 3.10 Sarana Pasar dan Minimarket

Pasar dan Minimarket sudah tersedia di wilayah sekitar Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo sehingga memudahkan warga untuk membeli kebutuhan mereka.

### 3.11 Sarana Penerangan

Jaringan listrik sudah masuk di Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo ini, maka 3 wilayah kelurahan tersebut telah memiliki sarana penerangan listrik yang memadai.

### 3.12 Sarana Berobat

Sudah banyak sarana berobat, seperti rumah sakit dan klinik 24 jam dengan akses yang mudah dan cepat yang berada di Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo sehingga para penduduk tidak kesulitan jika memerlukan pengobatan.

### 3.13 Sarana Olah Raga

Sarana olah raga, seperti bulu tangkis atau futsal tersedia dan mudah dijangkau oleh warga yang berada di Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo.

### 3.14 Sarana Keamanan

Secara garis besar wilayah Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo memiliki pos kampling sehingga kondisi keamanan sudah tercukupi.

### 3.15 Drainase

Saluran drainase yang tersedia tidak dapat mengalirkan air limbah dengan baik, sehingga menggenang. Mayoritas memiliki saluran drainase di Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo tapi menggenang. Hal ini akan semakin parah ketika terjadi rob dan banjir.

## 4. Analisis Permasalahan Kawasan Kumuh di Kecamatan Semarang Timur

Permasalahan umum yang di wilayah studi. Khusus terkait pada permukiman kumuh adalah masalah infrastruktur fisik dan kualitas sumberdaya masyarakat. Untuk tiap kelurahan, karakteristik permukiman kumuh hampir sama.

Beberapa permukiman kumuh yang sudah berkembang memiliki ekonomi lokal yang hidup di dalamnya, dengan pasar lahan dan perumahan informal mereka sendiri dan kelompok sosial dan budaya yang berbeda-beda. Sementara itu kondisi beberapa permukiman kumuh memang jorok, tidak sehat, melarat, dan terkucilkan secara sosial, kondisi-kondisi ini hanya ada karena tidak adanya alternatif dan kesempatan bagi penghuninya.

Beberapa permasalahan umum yang menjadi ciri dari permukiman kumuh antara lain:

#### 1. Jaringan jalan

Kondisi jalan di permukiman ini belum memadai. Pada tingkat jalan lingkungan dengan lebar jalan 2-4 m, panjang jalan 40-60m/Ha. Hal ini masih memadai untuk mencukupi pergerakan masyarakat keluar ataupun masuk ke dalam kawasan. Namun jalan yang ada belum mengacu pada standar pelayanan jaringan jalan untuk kawasan permukiman, antara lain:

- a. Panjang 40-60m/Ha dengan
- b. Lebar 2-5 m.

Kondisi riil jaringan jalan yang tersedia tidak mencukupi, baik dari lebar jalan 2-4

meter. Walaupun dengan kondisi lebar jalan 1-2 m sudah dapat dikatakan cukup karena pengguna jalan tersebut hanya sepeda, sepeda motor maupun becak, akan tetapi karena banyak disalah gunakan seperti untuk menjemur pakaian, untuk tempat parkir gerobak, jalan ini menjadi tidak nyaman ataupun aman untuk dilalui.

## 2. Jaringan Persampahan

Kecenderungan pengolahan sampah di dalam kawasan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, baik di bakar, dibuang, ataupun dengan dibuang di sungai. Hal ini berdampak pada kondisi lingkungan menjadi rusak. Untuk fasilitas sendiri, skala pelayanan sampah kawasan, depo sampah ataupun kurangnya fasilitas tong sampah komunal.

## 3. Sanitasi

Pembuangan limbah dengan septic tank, namun kondisinya rusak akibat terlalu sering terjadi rob. Akhirnya limbah dibuang ke selokan, limbah tidak bisa keluar rumah karena rob penduduk membuang limbah ke sungai. Tangki septict bersama, resapan bersama Mini IPAL. Untuk kawasan ini sebaiknya menggunakan sanitasi masal, dapat berupa program sanimas dengan bantuan partisipasi masyarakat di dalam kawasan.

## 4. Saluran Drainase

Kondisinya tidak memadai, tidak berjalan dengan lancar atau menggenang karena rob tinggi, sehingga aliran terhenti. Hal ini secara teknis dipengaruhi oleh kondisi kelerengan lahan yang datar, sehingga mempersulit aliran air pada saluran drainase. Standar pengelolaan dan ketersediaan jaringan drainase adalah:

- Jaringan drainasi dibangun memanfaatkan jaringan jalan dan badan air yang ada.
- Dimensi saluran diperhitungkan atas dasar layanan (coverage area) blok/lingkungan bersangkutan.
- Penempatan saluran memperhitungkan ketersediaan lahan (dapat disamping atau dibawah jalan).
- Jika tidak tersambung dengan sistem kota, harus disiapkan resapan setempat

atau kolam retensi.

Kawasan ini berada di daerah rawan rob, kondisi ini menjadi anomali baru dalam tahap perencanaan dan pembangunan jaringan drainase.



Sumber: Analisis Peneliti, 2013

**GAMBAR 2**  
**PERMASALAHAN JARINGAN JALAN,**  
**PERSAMPAHAN, DAN SALURAN DRAINASE**

## 5. Kepadatan Bangunan

Kondisi bangunan, selain bentuk dan bahan bangunan yang masih semi permanen, jarak antara bangunan rumah pada kawasan ini terbilang padat. Umumnya hanya berjarak 1-2 m antar bangunan. Hal ini mempengaruhi kualitas pencahayaan dan pergerakan udara di kawasan ini. Lebih jauh kondisi kepadatan ini akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat.



Sumber: Analisis Peneliti, 2013

**GAMBAR 3**  
**KONDISI KEPADATAN BANGUNAN**

## 5. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Kumuh

Dalam analisis ini akan dibahas mengenai tingkat partisipasi masyarakat yang sudah berkembang di Kelurahan Kemijen, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan

Kebongagung. Gambaran yang cukup relevan mengenai tingkat partisipasi masyarakat, dapat dilakukan dengan cara melakukan komparasi antara kondisi empiris dengan kajian literatur yang ada. Sebelumnya sudah pernah ada program pemerintah merupakan wujud dari program kemitraan antara pemerintah, swasta serta masyarakat yang secara bersama-sama melakukan kerjasama dalam pembangunan dan atau pengelolaan prasarana dan sarana. Namun dalam kenyataannya program yang sudah berjalan, masih belum sepenuhnya diketahui dan dimengerti oleh masyarakat sebagai obyek kebijakan sehingga partisipasi masyarakat kurang. Dari tujuan program tersebut cukup dapat diaplikasikan, tetapi prosesnya berjalan dengan kurang efektif sehingga perlu mengangkat program yang berbasis masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat seperti ini termasuk dalam tingkat partisipasi : informing.

#### 6. Analisis Metode Penanganan Kawasan Kumuh

Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Timur berbentuk suatu program yang bersifat lebih spesifik yaitu peremajaan kota (*urban renewal*) biasanya dimaksudkan untuk mengubah daerah perkampungan kumuh dengan mengisi dan membangun prasarana dan sarana yang sesuai dengan peruntukan lahannya sehingga layak untuk dihuni penduduk maupun untuk menampung aktivitas lainnya dan sekaligus memperindah penampilan (wajah) kota. Prasarana dan sarana yang dimaksud bisa berupa perumahan, bangunan komersial, jaringan air bersih, drainase, persampahan, jaringan air limbah, dan prasarana lainnya.

Contoh perbaikan kampung sebagai bentuk pengendalian kawasan kumuh ini dengan melihat kegiatan Program Pemerintah Kota Semarang "Gerdu Kempling" yang sudah dilakukan sejak Tahun 2011. Gerdu Kempling mengandung filosofi pos/tempat yang bersih, cemerlang melalui: hati dan pikiran yang bersih dalam melaksanakan program pembangunan, khususnya dalam

melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang Gerdu Kempling merupakan singkatan dari Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, Lingkungan.

Dalam melaksanakan program-program pemerintah daerah/kota sudah seharusnya dilakukan kontinuitas baik dalam perhatian, pengawasan, maupun evaluasi. Namun hal ini masih langka dilakukan terhadap program-program pemerintah daerah/kota itu pula yang terjadi dengan program Gerdu Kempling ini. Akibatnya, program ini kurang maksimal dan ditemukan banyak persoalan di lapangan.

Pada dasarnya program ini sangat baik, namun masih lemah dalam pelaksanaan maka dari itu Program Gerdu Kempling pada Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo ada baiknya menggunakan pola pendekatan TRIBINA agar fokus membantu mengatasi persoalan di lapangan. Tiga aspek pembinaan yang dilakukan meliputi:

1. Bina Lingkungan: Upaya perbaikan sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman.
    - a. Pembangunan MCK
    - b. Pembangunan jalan lingkungan
    - c. Penyediaan sarana air bersih
    - d. Sanitasi Lingkungan
  2. Bina Manusia: Upaya peningkatan dan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlunya lingkungan yang sehat dan layak huni.
    - a. Pelatihan/ketrampilan
    - b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan
    - c. Penyuluhan dan pembinaan rohani
  3. Bina Usaha: Upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berusaha yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan ekonominya.
    - a. Bantuan modal bagi usaha mikro dan kecil
    - b. Bantuan peralatan teknologi tepat guna
    - c. Bantuan modal usaha bidang pertanian, perikanan
- Pelaksanaan Gerdu Kempling menggunakan konsep Tribina dapat dilakukan

dengan menyesuaikan permasalahan yang ada pada Kelurahan Kebonagung, Kemijen, dan Rejomulyo.

## KESIMPULAN & REKOMENDASI

### *Kesimpulan*

Karakteristik dari permukiman kumuh di Semarang Timur yang mencakup 3 Kelurahan diantaranya Kelurahan Kemijen, Rejomulyo, dan Kebonagung dipengaruhi oleh kondisi fisik kawasan (jaringan jalan, drainase, persampahan, air bersih, dan sanitasi) dan non fisik (pendidikan, pendapatan, dan partisipasi masyarakat). Dari kondisi karakteristik tersebut masih banyak yang ditemui belum sesuai dengan standar pemerintah/kondisinya belum baik maka menggunakan metode penanganan perbaikan kampung untuk pengembangan optimalisasi sarana prasarana pendukung aktifitas bermukim.

### *Rekomendasi*

Metode penanganan permukiman kumuh di kawasan penelitian disesuaikan dengan karakteristik kawasan penelitian, yaitu perbaikan kampung. Gerdu Kempling adalah salah satu program pemerintah yang sudah dilakukan sejak tahun 2011 untuk mengentaskan kemiskinan yang terdapat pada kawasan kumuh. Gerdu Kempling merupakan singkatan dari Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, Lingkungan termasuk dalam metode penanganan perbaikan kampung bagi kawasan kumuh. Gerdu Kempling memiliki kekurangan. Pertama, tidak memiliki sinkronisasi antara program dengan kegiatan. Misalnya bantuan teknologi hingga strategi pemasaran ternyata tidak diberikan. Kedua, tidak tepat sasaran. Data nama dan alamat masih sering tidak sesuai. Ketiga, program dijalankan tidak sesuai kebutuhan. Ada baiknya Gerdu Kempling menggunakan pola pendekatan TRIBINA agar fokus membantu mengatasi persoalan di lapangan. Tiga aspek pembinaan yang dilakukan meliputi:

- Bina Lingkungan: Upaya perbaikan sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman.
- Bina Manusia: Upaya peningkatan dan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlunya lingkungan yang sehat dan layak huni.
- Bina Usaha: Upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berusaha yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan ekonominya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative dan Quantitative Approach*. London: Sage Publication.
- Mardikanto, & Soebiato. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putro, Jawas Dwijo. Juni 2011. *Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya*. Jurnal Teknik Sipil Untan. [internet]. Volume 11, Nomor 1. Tersedia: [http://portalgaruda.org/download\\_article.php?article=33470&val=2341](http://portalgaruda.org/download_article.php?article=33470&val=2341) [30 Oktober 2013]
- Ridlo, M. A. (2001). *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Unsissula Press.
- World Bank. (2003). *East Asia Urban Working Paper Series, Kota- Kota Dalam Transisi : Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta.